

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya, Unesa University Press, 2007).

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010).

Boy Nurdin, *Thinking Paradigm of Judges For Law Enforcement in Indonesia : From Positivism to Realism* (Annual International Conference Law, Regulation and Public Policy, 2017).

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan 12, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: PT Glora Aksara Pratama, 1983).

_____, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 4, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pertama, 1996).

Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* , Cet. 2, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2009).

_____, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, cet.2, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009).

_____, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris*,
(Bandung: Refika Aditama, 2013).

Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*,
(Jakarta: Dunia Cerdas, 2014).

Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010).

Henny Mono, *Praktik Berperkara Pidana*, (Malang : Banyumedia Publishing, 2007).

Herlien Budiono, "*Pertanggung jawaban Notaris berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 (Dilema Notaris diantara Negara Masyarakat, dan pasar)*," *Renvoi* No 4,28, III, 3 September 2005.

_____, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007).

I Made Widnyana, *Buku Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Dan Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*,
(Jakarta: Universitas Bhayangkara, 2013).

Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009).

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

JJJ. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Jilid I*, (Jakarta: UI Press, 1996).

Joko Sukisno, *Mengkritisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Yogyakarta : Simposium Sosialisasi dan diskusi UU No. 30 Tahun 2004).

Kanter dan Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTM, 1982).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/>. Diakses pada tanggal 05 Desember 2017.

Kode Etik Notaris Berdasarkan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015.

Liliana Tedjasaputro, *Etika Profesi Notaris (dalam penegakan hukum pidana)*, (Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 1995).

M. Abdurachman, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2008).

M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994).

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jilid I. (Jakarta, Pustaka Kartini, 1981).

Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kompas, 2001).

Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, (Bandung: Alumni, 1986).

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)

Mulyoto, *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2010).

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

Pieter E. Latumeten, 2007, *Apakah Pasal 66 UUDN Berlaku Bagi werda Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris?*, Edisi Januari Majalah Renvoi, Jakarta.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Dimasa Mendatang*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009).

Ronny Hanintijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)

R. Soegono Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1993).

_____, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cet. 2, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1993).

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu HUKUM*, Cetakan 13, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

R. Soesanto, *Tugas Kewajiban dan Hak-Hak Notaris Wakil Notaris (sementara)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978).

_____, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982).

R. Subekti, *Pokok-Pokok hukum Perdata*, Cetakan ke-XXXIV, (Jakarta: PT Intermasa, 2003).

R. Tresna, *Komentar HIR*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).

Salim HS dan Abdullah, *Perancangan Kontrak dan MOU*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Santia Dewi dan R.M Fauwas Diradja, 2011, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Pustaka Yustika, Yogyakarta.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011).

Sri Mamudji *et al.*, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum*,
(Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, 2005).

Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, (Bandung: Alumni, 1992).

Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu
Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press,
1986).

Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke-6,
(Yogyakarta: Liberty, 1998).

Tan Thong Kie, *Buku I studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*,
(Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2007).

_____, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek
Notaris. Buku I.*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, cetakan
ke-2, 2000).

Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Bandung:
Sumur Bandung, 1992).

2. Internet

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/37324/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> , diakses tanggal 05 Desember 2017.

<http://kbbi.web.id/prosedur>, diakses 04 Mei 2017.

Syafran Sofyan, 2013, *Catatan Perubahan UU Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 (Peraturan Menteri Sangat Mendesak)*,
http://medianotaris.com/catatan_perubahan_uu_jabatan_notaris_nomor_tahun_berita352.html, diakses pada tanggal 05 Desember 2017.

Tata Cara Pemanggilan Notaris Untuk Kepentingan Proses Peradilan Pidana Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya,
<https://media.neliti.com/media/publications/3139-ID-tata-cara-pemanggilan-notaris-untuk-kepentingan-proses-peradilan-pidana-berkaita.pdf>, diakses pada tanggal 05 Desember 2017.

Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik

<https://media.neliti.com/media/publications/114248-ID-pertanggungjawaban-pidana-dan-perlindung.pdf>
http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1815/6/151803035_file%206.pdf, diakses pada tanggal 10 Desember 2017.

3. Makalah dan Jurnal

A. Partomuan Pohan, 2014, *Beberapa Catatan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Makalah yang disampaikan di Hotel Mercure-Padang, Pada tanggal 29 Januari 2014.

Boy Nurdin, *The Role of Philosophy in Enhancing the Quality of Human Resource In Indonesia*, (DOI: 10.1515/mjss-2017-0035).

Suharizal, 2013, *Sembilan Tahun Jabatan Notaris Pasca Pemberlakuan Undang-Undang 30 Tahun 2004; Quo Vadis*, Makalah yang disampaikan pada tanggal 14 Desember 2013, Hotel Mercure, Padang

4. **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Risalah Sidang Perkara
Nomor 49 /PUU-X/2012.

Nota Kesepakatan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan
Ikatan Notaris Indonesia No. Pol : B / 1056 / V / 2006 dan
Nomor : 01 / MOU / PP-INI / V / 2006 Tentang Pembinaan dan
Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kitan Undang-Undang Hikum Acara Perdata (KUHP Perdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

